

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data Kementerian Agama RI (2023) menunjukkan di Jawa Barat terdapat 4.163 MI, namun masih 205 MI (4,9%) berstatus akreditasi C dan 172 MI (4,1%) belum akreditasi. Proporsi yang cukup besar ini mengindikasikan masih lemahnya tata kelola dan mutu pendidikan dasar Islam di wilayah tersebut. Temuan penelitian Firmansyah et al. (2018) mendukung urgensi ini bahwa meskipun fasilitas sekolah memenuhi standar, pemanfaatan sarana prasarana dalam proses pembelajaran perlu terus ditingkatkan agar mutu layanan pendidikan lebih optimal.

Di kalangan madrasah, penelitian lain juga menunjukkan korelasi tersebut. Sebagai contoh, Nauraida et al. (2024) melaporkan bahwa di Madrasah Tsanawiyah se-Kota Blitar terdapat pengaruh signifikan antara sarana prasarana, mutu layanan pendidikan, dan kepuasan siswa. Meskipun fokusnya pada MTs, temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan fasilitas pendidikan yang baik berperan langsung dalam mendukung mutu layanan pembelajaran.

Kondisi Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kota Bandung saat ini menunjukkan tantangan serupa. Saadah (2023) melaporkan bahwa kurangnya manajemen operasional di kepala madrasah mengakibatkan ketidakteraturan, dan secara khusus keterbatasan sarana prasarana menjadi masalah signifikan di MIN Kota Bandung. Berdasarkan observasi terhadap MIN 1 dan MIN 2 Kota Bandung melalui situs resmi masing-masing madrasah menunjukkan perbedaan yang cukup jelas dalam dokumentasi sarana dan prasarana. Situs MIN 1 Kota Bandung menyajikan informasi yang relatif lengkap mengenai fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Sebaliknya, situs MIN 2 Kota Bandung masih belum menampilkan data fasilitas secara rinci, sehingga sulit untuk menilai kondisi nyata sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini terlihat dari ketiadaan data rinci tentang jumlah ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya. Kekosongan informasi tersebut menandakan adanya kekurangan dalam administrasi dan dokumentasi fasilitas, yang seharusnya menjadi bagian penting dari pengelolaan

internal sekolah. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa meskipun fasilitas mungkin ada, tidak adanya pencatatan dan publikasi yang sistematis membuat evaluasi dan perencanaan kebutuhan sarana prasarana menjadi terhambat. Administrasi sarana prasarana yang kurang memadai dapat berdampak pada kesulitan pengelolaan sumber daya, pemeliharaan fasilitas, serta perencanaan pengembangan yang berbasis data, yang pada akhirnya memengaruhi kelancaran proses belajar mengajar.

Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 menegaskan bahwa Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal yang wajib tersedia di setiap satuan pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar. Oleh karena itu, administrasi sarana-prasarana menjadi unsur krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Sebagaimana dicatat oleh Ayusaputri et al., (2024), pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif adalah faktor berarti dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan sarana prasarana yang baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung aktivitas peserta didik dan guru. Dengan kata lain, jika fasilitas tidak dikelola atau dirawat dengan baik, hal ini dapat menurunkan mutu pelayanan pendidikan.

Berdasarkan tinjauan di atas, peneliti melakukan penelitian bertajuk “Hubungan Administrasi Sarana Prasarana dengan Mutu Layanan Pelaksanaan Pembelajaran di Madrasah (Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kota Bandung)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana administrasi sarana dan prasarana berperan dalam mendukung dan memengaruhi mutu layanan pelaksanaan pembelajaran di madrasah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan tata kelola pendidikan dasar Islam serta menjadi dasar bagi kebijakan dan rekomendasi peningkatan mutu layanan pelaksanaan pembelajaran di madrasah serta memperkaya khazanah penelitian manajemen pendidikan Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana administrasi sarana prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kota Bandung ?
2. Bagaimana mutu layanan pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kota Bandung ?
3. Bagaimana hubungan administrasi sarana dan prasarana dengan mutu layanan pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui administrasi sarana prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui mutu layanan pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis seberapa besar hubungan administrasi sarana prasarana dengan mutu layanan pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Menambah khazanah keilmuan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam, khususnya terkait hubungan administrasi sarana prasarana dengan mutu layanan pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyyah Negeri se-Kota Bandung.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Madrasah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berdampak pada mutu layanan pelaksanaan pembelajaran.

2) Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya administrasi sarana dan prasarana dalam mendukung mutu layanan pelaksanaan pembelajaran.

3) Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian serupa di lembaga pendidikan lain dengan cakupan dan pendekatan yang berbeda.

E. Kerangka Pemikiran

1. Administrasi Sarana Prasarana

Menurut Association of Facilities Managers (AFM), administrasi sarana dan prasarana diartikan sebagai suatu bentuk pengelolaan aset fisik seperti bangunan beserta layanan fasilitas dan seluruh elemen manusia yang terlibat di dalamnya (Irawan & Prayoga, 2024). Administrasi sendiri dapat dipahami sebagai proses kolaboratif yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir guna mencapai tujuan tertentu. M. Riduan (2019) mengemukakan bahwa administrasi merupakan serangkaian aktivitas yang berfungsi memberikan pelayanan, bantuan, serta pengarahan terhadap sesuatu agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sarana pendidikan mencakup segala bentuk peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.

Soetjipto dan Kosasi (2004) menerangkan aktifitas administrasi dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan meliputi; perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan sarana dan prasarana pendidikan.

1) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana

Tahap ini merupakan proses awal dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang melibatkan analisis, perhitungan, serta perumusan langkah-langkah strategis.